MENATA ARAH DAN PERUBAHAN PENDIDIKAN SENI RUPA PASCA PERUBAHAN STATUS INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN MENJADI UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Heri Soeprayogi

ABSTRAK

Perubahan status institut keguruan dan ilmu pendidikan di beberapa IKIP di seluruh Indonesia menjadi Universitas berdampak pada banyak hal, Disamping kesiapan secara struktural pengelola perguruan tinggi yang bersangkutan mulai level tertinggi hingga level terendah, juga sarana dan prasarana pendukung. Salah satu dampak yang mendasar adalah perlunya kesiapan beberapa faktor dan jurusan di lingkungan IKIP yang kini telah melebur menjadi universitas untuk menyiapkan sebuah kurikulum berbasis kompetensi sesuai dengan tuntutan dunia kerja di masyarakat dari fakultas dan jurusan tersebut. Hal lain yang perlu dipersiapkan juga adalah sarana dan prasarana belajar mengajar yang disesuaikan dengan standar kompetensi.

Kata Kunci: Menata Arah dan Perubahan, Pendidikan Seni Rupa, Pasca Perubahan Status.

PENDAHULUAN

Dunia pendidikan di Indonesia sungguh sangat memberikan implikasi yang berat terhadap pendidikan seni, mulai dari pendidikan dasar, menengah maupun pendidikan tinggi seni sekalipun. Banyak hal yang menjadi persoalan dalam aktifitas tersebut. Suka Hardjana dalam tulisannya pada harian Kompas, 15 Oktober 1997 mengatakan bahwa sejak 50 tahunan mengembangkan sistem pendidikan seni yang ditandai dengan kelahiran institusi seni rupa ITB pada tahun 1949 dan kelahiran institusi ASRI tahun 1950, hingga kini belum ditemukan formula pendidikan seni khususnya seni rupa untuk dikembangkan. Metodemetode dan formula pengajaran seni di Indonesia masih dipinjam dari kultur lain yang dalam banyak hal sudah ketinggalan zaman. Disamping itu ada alasan klise yang kerap menjadi penghambat utama adalah dengan keterbatasan dana pengembangan pendidikan tinggi seni di Indonesia yang tidak memadai.

Sejalan dengan yang dikemukakan di atas, Susanto (2003:248) mengatakan bahwa adanya sikap ketergantungan yang dalam perkembangannya dilihat dari perspektif industrialisasi pendidikan dan ekonomi abat ke 21, sangat rawan untuk dipertahankan eksistensinya. Lebih jauh dikemukakan bahwa, tenaga pengajar dan pengelola yang memenuhi kwalifikasi tuntutan dunia pendidikan yang begitu komplek muatannya terus berubah dan berkembang serta harus bersaing dengan dinamika kesenian yang secara lugas tumbuh dan berkembang di luar kampus. Disisi lain lembaga-lembaga formal pendidikan seni di Indonesia masih terlalu sedikit dan tidak sebanding dengan tuntutan demografi masyarakat Indonesia.

Dapat dibayangkan di sebuah negara dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa, jumlah sekolah kesenian yang ada lebih kurang 20 buah saja yang terdiri dari berbagi jenjang tingkatan pendidikan (setingkat pendidikan menengah akademi dan perguruan tinggi) dan itu terkonsentrasi di daerah pulau Sumatera, Jawa dan Bali. Lain lagi dengan percepatan informasi dan teknologi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dan terlambat diantisipasi di sebagian besar sekolah-sekolah kesenian tersebut seluruh Indonesia.

Kurang terkonsentrasinya pertumbuhan pendidikan tinggi seni khsusunya di Indonesia karena banyaknya keinginan yang hendak dicita-citakan, sangat kompleks dan kurang realistis dengan kenyataan budaya seni yang tumbuh di masyarakat. dari fakta-fakta yang ada di tengah-tengah masyarakat bahwa kebanyakan pengembangan seni di Indonesia lebih banyak berada di luar kampus seni, hal ini menunjukkan bahwa lembaga-lembaga pendidikan seni masih memiliki jarak, sehingga terlihat tidak terdapat korelasi antara kampus seni dan kehidupan berkesenian di masyarakat, sehingga dapat dipastikan lembaga-lembaga pendidikan seni tidak mendapatkan posisi kunci di masyarakat.

Berangkat dari apa yang dikemukakan di atas tentunya hal ini tidak bisa dilepaskan begitu saja dari struktur birokrasi di Indonesia yang sangat tidak memberikan keseimbangan antara pola kreativitas pengelolaan dengan hak dan kewajiban yang diperoleh. Permasalahan yang muncul sering tidak mendapat pemecahan yang tuntas sebagai konsekuensi politis yang diperjuangkan negara. Hal ini terbukti dari porsi pendanaan bidang pendidikan dalam GBHN yang kurang dari 20%, dan porsi yang diberikan untuk pendanaan bidang pendidikan seni yang mungkin tidak sampai 1% dari dana pendidikan tersebut. Akibatnya pendidikan seni dan lembaga-lembaga pendidikannya selalu dinomor duakan dan tidak dianggap. Persaingan antar sektor sebagai bagian dari kebijakan pengaturan keuangan negara masih menjadi masalah tersendiri lagi bangsa ini serta belum sepakatnya antar elite politik di Indonesia tentang kemampuan sektor seni untuk dapat menyumbangkan devisa untuk negara. Hal ini juga menyumbangkan tidak dipercayanya dan memberikan pukulan terhadap sektor pendidikan seni khususnya.

Perubahan dari waktu kewatu tetap berlangsung dan kebijakan demi kebijakan terus bergulir. IKIP (Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan) yang di dalam lembaga ini terdapat satu jurusan. Pendidikan Seni Rupa di bawah naungan Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, merupakan sebuah lembaga yang melahirkan tenaga-tenaga pendidik di bidang pendidikan sen rupa, ikut merasakan imbas dari sebuah kebijakan tersebut. Sebagai contoh misalnya di bidang pendidikan kesenian, kendala yang tampak adalah orientasi rasionalistik yang berlebihan dari kurikulum 1994 terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mengabaikan pengetahuan kesenian sebagai penyeimbang jiwa anak-anak dalam masa pertumbuhannya.

Hal ini sejalan dengan Rohendi Rohidi (2000) dalam kertas kerjanya pada Seminar Nasional "masa depan seni rupa, antara pendidik, globalisasi dan otonomi daerah yang mengatakan bahwa, "kurikulum dan pelaksanaan pendidikan tidak memberi peluang bagi anak didik untuk berkembang atau mengembangkan kepribadiannya secara utuh dan seimbang. Dalam aspek kebijakan, substansi,

waktu, bidang pendidikan humaniora, khususnya pendidikan seni, kurikulum yang dirancangkan kehilangan wajah emansipatoritasnya. Bila bertitik tolak pada pendidikan dasar dan menengah, kurikulum menjadi sebuah penegasar pendidikan kognitif yang tidak "bercita rasa".

Dilain pihak masalah yang dihadapi antara lain adalah masalah pemusatan kurikulum (nasional) dan disegi lain beban untuk melestarikan kesenian tradisional di tengah menglobalnya bentuk-bentuk kesenian dari luar yang secara langsung telah mengintervensi budaya dan pemikiran generasi-generasi muda melalui berbagai media yang setiap detik menginformasikan apa yang mereka buat dan mereka miliki. Memang bentuk kesenian nasional Indonesia itu tidak ada, tindak pidana nasionalisme bangsa Indonesia itu dibangun atas dasar keragaman budaya dan kesenian tradisional masyarakat yang mengaku sebagai bangsa Indonesia. Hal ini perlu dipahami oleh anak-anak Indonesia, sebagai anak-anak didik yang akan mewarisi masa depan Indonesia dan hal ini sepertinya harus tergambar dalam kurikulum pendidikan seni khususnya pendidikan seni rupa.

Berangkat dari judul dan permasalahan yang telah diuraikan diatas, perubahan status dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas Negeri Medan memberikan hikmah tersendiri bagi para berupa dan simpatisan seni rupa terutama para birokrasi dilingkungan Universitas Negeri Medan untuk duduk bersama mengawali dengan mencoba memikirkan ke arah sebuah jurusan yaitu Jurusan Pendidikan Seni Rupa di lingkungan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan untuk didudukkannya jurusan ini pada porsi yang sebenarnya disebuah lembaga Universitas.

PEMBAHASAN

Jurusan Pendidikan Seni Rupa di lingkungan Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni telah berdiri sejak tahun 1968. Jurusan ini telah banyak melahirkan tenagatenaga pendidikan seni rupa yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, telah banyak memberikan kontribusi terhadap perkembangan pendidikan seni rupa. Jurusan ini disamping mendidik tenaga kependidikan di bidang seni rupa, juga terbuka kemungkinan untuk mengembangkan dirinya menajdi orang seniman profesional di bidang kesenian (lukis, patung, grafis, dan lain-lain) atau pun dapat mengembangkan dirinya sebagai seorang pengusaha di bidang advertesing. Sungguh sebuah jurusan yang sangat kompleks, apabila jurusan dikelola profesional dengan sebuah kurikulum yang memang handal untuk dunia kerja (kurikulum berbasis kompetensi). Namun potensi yang ada ini tidak dikelola dengan baik sehingga berbagai kendala muncul dalam perjalanannya, sama dengan keadaan yang digambarkan pada bagian pendahuluan diatas.

Menurut Rohendi Rohidi (2000), hal mendasar pada pelaksanaan pendidikan seni rupa dapat diidentifikasikan ke beberapa masalah yang terjadi, baik yang terjadi akibat pengelolaan yang telah berjalan maupun terjadi karena unsur-unsur lainnya, misalnya: (1) Pembangunan dan orientasinya, (2) Kebudayaan, (3) Pendidikan dan kurikulum, (4) Pelaksanaan kurikulum. Dari masalah-masalah yang dikemukakan diatas setidaknya akan banyak hal terjadi dalam menunjang terjadinya sebuah kekuasaan yang akan menunjang terjadinya kondisi yang cukup kondusif bagi dunia seni rupa itu sendiri. Senada dengan apa yang dikemukakan

diatas, masalah orientasi pembangunan bangsa selama beberapa dasawarsa yang bersifat idelogis dan developmentalis-birokratis, telah menolehkan jejak-jejak pada kehidupan masyarakat secara luas. Pembangunan yang dipolakan dan diseragamkan dari berbagai aspek kehidupan dengan pusat sebagai proses komando, telah menjadikan masyarakat menjadi robot-robot pekerja sesuai dengan kemauan pemerintah dan penguasa. Segi lain adalah pembangunan yang dilaksanakan lebih mementingkan pertumbuhan berupa deretan angka-angka kemajuan bersifat fisik, sementara pembangunan mental masyarakat secara umum diabaikan. Rakyat hanya ditekan dengan kemauan penguasa. Pertumbuhan ekonomi yang pesat pada waktu itu hanya kamulfase dari penguasa untuk menggambarkan keadaan negara (segelintir masyarakat) telah mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat baik, akan tetapi jutaan rakyat tetap saja miskin dan kelaparan. Miskin dalam arti tidak mendapatkan hak yang seharusnya dari negara. Rakyat hanya sapi-sapi perahan dan budak-budak penguasa, dan barangkali keadaan ini yang ikut andil merespon terciptanya konsep otonomi. karena secara birokrasi pemerintah daerah-daerah pun miskin dan keringkerontang, sementara potensi daerahnya sendiri sebenarnya kaya, tetapi karena sentralistik kekuasaan dan pemerintahan kekayaan itu hanya untuk pusat.

Akibat situasi ini terciptalah jurang kesenjangan yang besar, kemajuan pusat dan daerah yang tidak setara, perbedaan kelas antara kaya dan miskin (ekonomi kuat dan ekonomi lemah) di tengah-tengah kehidupan masyarakat sehingga pembangunan itu hanya dinikmati oleh sedikiti rakyat, sementara lainnya tetap terjajah karena ketidakmampuan untuk mengangkat harkat kemanusiaannya didalam negara, sementara negara melalui tangan-tangan penguasanya memanfaatkan situasi ini untuk lebih melanggangkan kekuasaannya. Akibatnya baik secara langsung maupun tidak langsung telah terjadi proses marjinalisasi potensi kehidupan rakyat banyak.

Kebudayaan nusantara dengan kekerasannya sungguh merupakan potensi kehidupan berbangsa yang telah terabaikan pengembangannya. Perbedaan-perbedaan dikarenakan keeklusifan budaya karena homogeni kekuasaan, telah menumbuhkan rasa ketidak-adilan, memandalkan kemampuan apresiasi dan empati antar budaya. Hal ini cenderung dapat menimbulkan konflik horizontal maupun konflik vertikal. Dalam hal ini kita dapat melihat kecendrungan munculnya sikap arogansi sektoral atapun primordial, yang mengarah kepada disnitegrasi bangsa. Ada kencendrungan pranata-pranata sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat baik komplek etnis, agama, dan sebagainya tidak mendapat kondisi yang lebih baik untuk tumbuh dan berkembang.

Sementara di bidang pendidikan kurikulum pendidikan yang kurang berorientasi kepada Ilmu Pengetahuan dan Seni (IPTEKS) ditambah (IMTAQ) rusaknya moral di segala lapisan masyarakat juga memperparah pelaksanaan bidang pendidikan tersebut disamping memang anggaran pendidikan yang sangat minim yang disediakan pemerintah. Di sisi lain pendidikan seni dalam pelaksanaan kurikulum juga tidak dianggap sebagai mata pelajaran ataupun bidang kajian yang menjanjikan masa depan di perguruan tinggi, sehingga mata pelajaran ataupun bidang kajian seni termasuk seni rupa kurang peminatnya di perguruan tinggi.

Menjadikan momentum perubahan status dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP Medan) menjadi Universitas yaitu Universitas Negeri Medan sudah selayaknyalah kita sivitas akademika Universitas Negeri Medan untuk duduk bersama merencanakan sebuah lembaga pendidikan seni rupa di bawah payung Universitas Negeri Medan dengan cara mengembangkan jurusan Pendidikan Seni Rupa menjadi sebuah Fakultas Kesenian yang didalamnya bernaung jurusan-jurusan seni. Desain, seni pertunjukan dengan bebarap program studi yang relevan dan menjadi bidang kompetensi di masyarakat. Ini adalah saat yang tepat untuk merencanakan sekaligu melaksanakan ide baik dikarenakan beberapa hal di bawah ini. (1) Untuk wilayah Sumatera bagian utara (Sumut dan NAD) merupakan satu-satunya Universitas yang memiliki jurusan seni-rupa dan potensi ini dimungkinkan untuk dikembangkan menjadi sebuah Fakultas Kesenian. (2) Potensi budaya wilaya Sumatera bagian utara (Sumut dan NAD) dengan berbagai etnis yang ada didalamnya dapat menjadi sumber kajian untuk dikembangkan menjadi kekhasan Fakultas Bahasa dan Seni di Universitas Negeri Medan. (3) Secara regional dan Internasional posisi Universitas Negeri Medan yang berada di kota Medan dan merupakan kota nomor 3 terbesar di Indonesia yang merupakan sebuah kota metropolitan yang ada di Pulau Sumatera dan bertetangga langsung dengan Singapura dan Malaysia. Hal ini dimungkinkan untuk dapat menjaring mahasiswa dari luar untuk menuntut ilmu di jurusan-jurusan yang ada di Fakultas Kesenian yang ada di Universitas Negeri Medan. (4) Sebagai DTW (Daeerah Tujuan Wisata) propinsi Sumatera Utara dapat bekerja sama dengan Universitas Negeri Medan untuk menyiapkan tenaga-tenaga ahli kesenian-kesenian tradisional Sumatera Utara yang dapat dijual sebagai bagian dari paket wisata yang ada di Sumatera Utara.

Dari apa yang dikemukakan diatas perlu kiranya kita sivitas akademika yang ada di Universitas Negeri Medan untuk sama-sama memikirkan kemungkinan-kemungkinan untuk mewujudkan sebuah Fakultas Kesenian di lingkungan Universitas Negeri Medan terutam para pengambil kebijakan mulai dari Rektor dan jajarannya, Dekan dan para pembantunya serta sivitas akademika di jurusan seni rupa serta jurusan-jurusan yang dapat diselaraskan untuk duduk di bawah payung Fakultas Kesenian.

KESIMPULAN

Dunia pendidikan di Indonesia sungguh memberikan implikasi yang sangat terhadap pendidikan seni maupun pendidikan tinggi seni di Indonesia yang hingga kini belum ditemukan formula pendidikan seni khususnya seni rupa untuk dikembangkan. Metode-metode pendidikan seni masih dipinjam dari kultur lain yang dalam banyak lial sudah ketinggalan jaman.

Dinamika dunia kesenian yang berkembang di tengah masyarakat cenderung berjalan lebih cepat dibandingkan antisipasi kampus-kampus seni untuk menjadi konseptor dan metivator untuk pengembangan kesenian cenderung lamban, sehingga lembaga-kembaga pendidikan seni selalu tertinggal dibandingkan dengan perkembangan seni dan kesenian itu sendiri.

Anggaran hidup yang diberikan khusus untuk pendidikan seni dari seluruh anggaran pendidikan yang dianggarkan untuk bidang pendidik dari APBN yang

memang tidak memungkinkan pendidikan seni khusus seni rupa untuk dapat berkembang ke arah yang lebih baik disamping pemerintah dalam melihat produkproduk seni dapat menjadi sumber devisa negara.

Perubahan status Institut Keguruan dan Ilmu Pengetahuan menjadi Universitas khususnya IKIP Medan menjadi UNIMED dapat menjadi momentum yang baik untuk mengembang jurusan Pendidikan seni rupa, dan jurusan-jurusan seni lainnya untuk dapat bernaung dalam satu fakultas yaitu sebuah fakultas kesenian, yang berorientasi keilmuannya mengacu pada budaya-budaya kesenian masyarakat etnis yang ada di Sumatera Utara (Sumut dan NAD) sehingga Fakultas ini memiliki kekhasan tersendiri.

Perlu kiranya segenap sivitas akademika di Universitas Negeri Medan untuk memikirkan hal ini untuk pengembangan Universitas Negeri Medan ke arah yang lebih berdaya saing.

DAFTAR BACAAN

Anas, Biranul (ed). 2000. Refleksi Seni Rupa, Dulu, Kini dan Esok. Jakarta: Balai Pustaka.

Hardjana Suka. 1997. Pendidikan Tinggi Seni di Indonesia Antara Realitas dan Utopia. Kompas, 15 Oktober.

Rohendi Rohidi, Tjetjep. 2000. Pendidikan dan Pendidikan Seni Rupa dalam Arus Globalisasi dan Jati Diri Lokal. "Kertas Kerja Seminar Nasional" Masa Depan Seni Rupa, Antara Pendidikan Globalisasi dan Etonomi Daerah di UC.UGM, ASRD "AKSERI". Yogyakarta, 16 November 2000.

Bandung: Bandung Press. 2000. Kesenian dalam Pendekatan Kebudayaan, STSI

Salam, Aprianus (ed). 1998. Umar Kayan dan Jaringan Semiotik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Susanto, Mikke. 2003. Membongkar Seni Rupa. Yogyakarta: Penerbit Jendela.

Drs. Heri Soperayogi, M.Si.

Lahir di Bukitinggi, 10 Juli 1963. Memperoleh gelar Sarjana pendidikan pada jurusan seni rupa dan Kerajinan IKIP Padang pada tahun 1990. Bertugas di Jurusan Pendidikan Seni Rupa pada Universitas Negeri Medan 1992 hingga sekarang. Memperoleh gelar Magister Saint pada Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Medan tahun 2005.

